

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	xviii
SUMMARY	xxi
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	21
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Penelitian	22
1.4.1. Manfaat yang bersifat akademis.....	22
1.4.2. Manfaat yang bersifat praktis	23
1.5. Kerangka Teori	23
1.5.1. Teori Kekuasaan dan Kewenangan	23
1.5.2. Teori tentang Pembantu Presiden	28
1.5.3. Teori tentang Jabatan	32
1.5.4. Teori tentang Tanggung Jawab	34
1.6. Metode Penelitian	39
1.6.1. Tipe Penelitian	39
1.6.2. Pendekatan Masalah	40
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	43
1.7. Pengolahan dan Analisis Data	44
1.7.1. Pengolahyan Bahan Hukum	44
1.7.2. Analisis Bahan Hukum	45
1.8. Orisinalitas Penelitian	46
1.9. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	48

BAB II PRINSIP PELIMPAHAN KEKUASAAN	
PEMERINTAHAN NEGARA DALAM HAL PRESIDEN	
BERHALANGAN SEMENTARA	52
2.1. Konsepsi-Konsepsi Dasar Prinsip Pelimpahan Kekuasaan	
Pemerintah Negara Dalam Hal Presiden Berhalangan	
Sementara	52
2.1.1. Konsepsi Dasar Mengenai “Prinsip”	54
2.1.2. Prinsip “Berhalangan” Sementara	62
2.1.3. Konsepsi Dasar Mengenai Pelimpahan Kekuasaan	
Dan Prinsip Pelimpahan Kekuasaan	70
2.2. Prinsip Umum Kekuasaan Pemerintahan Negara.....	76
2.2.1. Kekuasaan Pemerintahan Negara	76
2.2.2. Sumber Kekuasaan Presiden	80
2.2.3. Prinsip Pemisahan Kekuasaan	87
2.2.4. Kedudukan dan Hubungan Kekuasaan Presiden	
Dan Wakil Presiden	96
2.3. Prinsip Konstitusionalisme	106
2.4. Prinsip Norma Hukum Presiden Berhalangan Sementara	111
2.4.1. Prinsip Norma atau Kaidah	114
2.4.2. Norma Hukum Kabur Dalam Hal Presiden Berhalangan ...	122
2.5. Prinsip Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam	
Hal Presiden Berhalangan Sementara Kajian Dari Perspektif	
Negara Hukum Dan Demokrasi	132
2.5.1. Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi	132
2.5.2. Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara Berdasarkan	
Prinsip Demokrasi Dan Pemilihan Umum	169
2.6 . Prinsip Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara	
Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara Kajian Dari	
Perspektif Sistem Pemerintahan	178
2.6.1. Sistem Pemerintahan Parlementer	180
2.6.2. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia	183

BAB III BENTUK-BENTUK PELIMPAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM HAL PRESIDEN BERHALANGAN SEMENTARA	189
3.1. Pelimpahan Kekuasaan Dan Bentuk Pelimpahan Kekuasaan Dalam Presiden Berhalangan Sementara	189
3.1.1. Peristilahan Dan Arti Pelimpahan Kekuasaan	189
3.1.2. Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan	191
3.1.3. Bentuk Pelimpahan Kekuasaan	299
3.1.4. Pemetaan Kekuasaan Yang Dapat Dilimpahkan Dalam Bentuk Delegasi Dan Mandat	206
3.2. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.....	225
3.2.1. Konsep Kewenangan	226
3.2.2. Jabatan Dan Pemangku Jabatan	240
3.3. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Beberapa Perbandingan	243
3.4. Wewenang Atribusi Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Negara Hukum Dan Demokrasi.....	260
3.5. Wewenang Delegasi Dan Wewenang Mandat Sebagai Bentuk Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara	279
3.5.1. Wewenang Delegasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara	282
3.5.1.1. Peristilahan Wewenang Delegasi	282
3.5.1.2. Wewenang Delegasi Penyelenggaraan Pemerintahan..	284
3.5.2. Wewenang Mandat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara	305
3.5.2.1. Peristilahan Wewenang Mandat	305
3.5.2.2. Wewenang Mandat Penyelenggaraan Pemerintahan ..	308

BAB IV AKIBAT HUKUM PELIMPAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM HAL PRESIDEN BERHALANGAN SEMENTARA	315
4.1. Tindakan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	315
4.2. Tindakan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Dalam Konsepsi Hukum Publik	319
4.3. Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan Ketatanegaraan Republik Indonesia	325
4.4. Kekuasaan Pemerintahan Negara Beralih atau Berpindah Tangan ke Pihak Lain	347
4.4.1. Kekuasaan Pemerintahan Negara Beralih/Berpindah Dalam Pergantian	357
4.4.2. Kekuasaan Pemerintahan Negara Beralih/Berpindah Dalam Bentuk Perwakilan	366
4.4.2.1. Diwakilkan Kepada Wakil Presiden Dalam Bentuk Delegasi	369
4.4.2.2. Diwakilkan Kepada Pejabat Lain (Menteri dan Setingkat Menteri)	386
4.5. Akibat Hukum Terhadap Tugas Dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan	396
4.5.1. Akibat Hukum Terhadap Tugas dan Wewenang Berdasarkan Pelimpahan Kepada Wakil Presiden	397
4.5.2. Akibat Hukum Terhadap Tugas dan Wewenang Berdasarkan Pelimpahan Kepada Menteri atau Pejabat lain	418
4.5.3 Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan	426
BAB V PENUTUP	435
5.1. Simpulan	435
5.2. Saran	438
DAFTAR BACAAN	